

**TERJEMAHAN NAMA INSTANSI PEMERINTAH DI
INDONESIA: SEBUAH TINJAUAN
Muhammad Ersan Pamungkas***

Abstract

One type of translation tasks commonly carried out in many government institutions in Indonesia is translation of names of government institutions from Indonesian into foreign languages, notably English. This type of translation arguably poses not only technical challenges but also non-technical challenges. This paper seeks to review challenges related to this type of translation. The research adopted a qualitative descriptive method by making an inventory of listing and presenting existing translations of the names of government institutions, proposing translations of the names of government institutions that are not yet available, and explaining problems identified in the existing translations, as well as problems related to the translation of the names of the government institutions. The result of this research shows that most government institutions do not have English translation of the names of their institutions. The existing translations of the names of several institutions even also differ in terms of translation style. To that end, it is important to not only encourage government institutions that do not have yet the official translations of their institutions to have them translated but also to harmonize the already existing translations in order to create uniformity of the translations of the names of all government institutions in Indonesia.

Keywords: *translation, government, names of institutions*

Abstrak

Salah satu jenis tugas penerjemahan yang lazim dilakukan di banyak lembaga pemerintah di Indonesia adalah penerjemahan nama lembaga pemerintah dari bahasa Indonesia ke bahasa asing, khususnya bahasa Inggris. Penerjemahan jenis ini tidak hanya menimbulkan tantangan teknis namun juga tantangan non-teknis. Makalah ini berupaya meninjau tantangan-tantangan yang terkait dengan jenis penerjemahan ini. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menginventarisasi, membuat daftar, dan menyajikan terjemahan nama-nama lembaga pemerintah yang sudah ada, mengusulkan terjemahan

* Surel: ersanpamungkas83@gmail.com, Unit Kerja Asisten Deputy Naskah dan Penerjemahan, Kedeputan Bidang Dukungan Kerja Kabinet, Sekretariat Kabinet Republik Indonesia

nama-nama lembaga pemerintah yang belum tersedia, dan menjelaskan permasalahan yang teridentifikasi dalam terjemahan yang ada, serta permasalahan terkait penerjemahan nama lembaga pemerintah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar lembaga pemerintah tidak memiliki terjemahan nama lembaga mereka dalam bahasa Inggris. Bahkan terjemahan nama beberapa lembaga yang ada juga berbeda dari segi gaya penerjemahannya. Untuk itu, penting untuk tidak hanya mendorong lembaga-lembaga pemerintah yang belum memiliki terjemahan resmi lembaganya untuk menerjemahkannya tetapi juga melakukan harmonisasi terhadap terjemahan-terjemahan yang sudah ada guna menciptakan keseragaman terjemahan seluruh nama lembaga pemerintah di Indonesia.

Kata Kunci : penerjemahan, pemerintah, nama lembaga

1. PENDAHULUAN

Salah satu penerjemahan yang kerap dilakukan di sebagian besar instansi pemerintah pusat adalah penerjemahan nama instansi atau lembaga pemerintah dari bahasa Indonesia ke bahasa asing, misalnya *Komisi Pemberantasan Korupsi* dialihbahasakan ke dalam bahasa Inggris menjadi *Corruption Eradication Commission*, *Kementerian Keuangan* dialihbahasakan ke dalam bahasa Arab menjadi *وزارة مالية*, atau *Kementerian Luar Negeri* dialihbahasakan ke dalam bahasa Prancis menjadi *Ministère de l'Europe et des Affaires Étrangères*.

Menurut Oktaviani (2010), lembaga negara adalah lembaga pemerintahan yang berkedudukan di pusat dengan tugas, fungsi dan kewenangannya yang secara tegas diatur dalam UUD Republik Indonesia 1945. Lembaga negara, atau juga disebut dengan istilah alat-alat kelengkapan negara, dapat juga dimaknai sebagai instansi - instansi yang dibentuk untuk menjalankan fungsi-fungsi negara. Adapun menurut Simamora (2016), lembaga negara adalah alat kelengkapan negara atau istilah lain yang digunakan untuk itu yang berfungsi melaksanakan dan menjalankan tugas pokok kekuasaan negara.

Penerjemahan sendiri memiliki beragam definisi dari ahli yang berbeda, salah satunya Hatim & Munday (2013) yang menyatakan,

translation is a process of conveying messages across linguistic and cultural barriers, meaning that the process of translation connects two languages in order to deliver the meaning from one language to another, atau Colina (2015) yang menyatakan, *translation is a process of product resulting from transferring or the way of mediating written texts from one language to another.*

Penerjemahan nama instansi pemerintah umumnya diperlukan sebagai bagian dari penerjemahan dokumen seperti teks hukum, surat resmi presiden/menteri/gubernur atau pejabat tinggi negara, sambutan resmi, laporan, atau artikel berita situs web yang mengharuskan terjemahan nama instansi. Penerjemahan nama instansi juga kerap diperlukan untuk pembuatan kartu nama, aplikasi beasiswa sekolah/kuliah di luar negeri, pembuatan kop surat, serta keperluan terkait lainnya. Selain itu, bagi sejumlah instansi pemerintah yang memiliki keterkaitan, korespondensi, atau kerja sama dengan pihak asing seperti organisasi, badan internasional, atau pemerintah negara lain, penerjemahan nama instansi juga diperlukan.

Sejumlah instansi pemerintah bahkan telah “meresmikan” terjemahan nama instansinya, sementara sebagian lain telah menerjemahkan dan “meresmikan” nama unit kerja dan jabatan yang ada di dalam instansi terkait. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, misalnya, telah menerjemahkan dan meresmikan terjemahan nomenklatur unit kerja dan jabatan kementerian ke dalam bahasa Inggris yang dituangkan dalam sebuah peraturan menteri sehingga unit kerja yang ada di dalamnya wajib menggunakan terjemahan resmi tersebut. Begitu pula dengan Kementerian Perhubungan yang menuangkannya dalam Keputusan Menteri atau Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menuangkannya dalam Pedoman Menteri, atau Kementerian Hukum dan HAM yang menuangkannya dalam sebuah Peraturan Menteri.

“Meresmikan” terjemahan nama instansi dan unit kerja yang ada di dalamnya memang diperlukan agar terjemahan dapat secara formal

diakui dan memiliki kekuatan hukum, setidaknya di instansi terkait. Terjemahan “resmi” tersebut juga diharapkan dapat diakui dan digunakan secara luas tidak hanya di instansi yang bersangkutan tetapi juga di instansi lain atau oleh masyarakat luas, termasuk media masa. Selama ini, yang dianggap sebagai terjemahan “resmi” adalah terjemahan yang dihasilkan penerjemah tersumpah. Akan tetapi, untuk penelitian ini, terjemahan nama instansi yang dikeluarkan secara formal oleh sebuah instansi pemerintah dan dituangkan dalam sebuah peraturan perundang-undangan dan juga digunakan dalam situs web resmi instansi dapat juga dianggap sebagai terjemahan resmi.

Penerjemahan nama instansi pemerintah dapat membawa tantangannya sendiri, baik dari aspek teknis penerjemahan maupun aspek terkait lainnya. Dari aspek penerjemahan, tantangan yang muncul misalnya terkait teknik penerjemahan yang digunakan atau ideologi penerjemahan yang harus diterapkan, baik itu ideologi pelokalan atau pengasingan, atau bagaimana jika tidak ada padanan yang akurat dalam Bahasa Sumber (BSu). Walaupun mungkin dianggap “hanya menerjemahkan satu nama atau istilah” saja, perlu diingat bahwa menerjemahkan nama instansi akan menghasilkan terjemahan yang mungkin akan digunakan dalam waktu yang relatif cukup lama atau permanen (kecuali bila ada revisi secara berkala) dan terjemahannya akan “diabadikan” dalam bentuk kop surat, kartu nama, atau di situs web dan diresmikan dalam sebuah peraturan perundang-undangan sehingga kualitas terjemahannya perlu terjamin.

Dari aspek non-penerjemahan, masalah yang mungkin timbul misalnya terkait legalitas terjemahan. Misalnya, apakah terjemahan sudah diresmikan; bagaimana diseminasi terjemahan dilakukan atau seberapa luas terjemahan tersebut diketahui masyarakat luas; atau keberterimaan atau apakah unit kerja lain dalam satu instansi atau instansi lain dapat menerima terjemahan tersebut atau tidak serta atau apakah gaya terjemahan antara satu instansi dengan instansi lain sama atau berbeda. Terjemahan nama instansi atau nomenklatur yang sudah

ada tetapi tidak diresmikan dapat saja mendatangkan masalah karena terjemahan tersebut dapat dianggap “tidak resmi” dan kemungkinan tidak akan diakui dan digunakan secara luas.

Bertolak dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa penerjemahan nama instansi pemerintah diperlukan dan dapat menghadirkan tantangannya sendiri. Oleh karena itu, penelitian terkait penerjemahan nama instansi di Indonesia diharapkan dapat memberikan manfaat, tidak hanya bagi penerjemah tetapi juga bagi masyarakat luas. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berupaya meninjau penerjemahan nama instansi pemerintah dan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada. Penelitian ini juga berupaya menawarkan solusi jika ditemukan masalah-masalah terkait penerjemahan nama instansi pemerintah di Indonesia.

Penelitian terkait penerjemahan nama instansi, khususnya penerjemahan nama instansi pemerintah di Indonesia, belum banyak dilakukan meskipun ada sejumlah penelitian terkait, seperti misalnya penelitian tentang penerjemahan istilah-istilah organisasi pemerintahan dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Mandarin yang dilakukan oleh Ren (2009) atau Sayogie (2018) yang meneliti padanan dan istilah-istilah yang tidak dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dalam UUD 1945. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode deskriptif kualitatif dengan menginventarisasi, mendata, dan menyajikan terjemahan nama instansi pemerintah yang sudah ada, mengusulkan terjemahan nama instansi pemerintah yang belum ada, mengulas masalah-masalah yang teridentifikasi dalam terjemahan yang sudah ada, serta masalah terkait penerjemahan nama instansi pemerintah.

Untuk penelitian ini, data yang disajikan adalah terjemahan dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris yang sudah ada serta usulan

terjemahan dari penelitian untuk nama-nama instansi pemerintah yang belum memiliki terjemahan. Pembahasan dalam penelitian ini dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. menginventarisasi instansi-instansi pemerintah di Indonesia berdasarkan kategori yang dibuat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dalam penelitian ini, data yang digunakan hanya nama instansi dan terjemahannya (jika sudah ada) dari pemerintah pusat dan tidak mencakup instansi pemerintah daerah;
2. menginventarisasi alamat situs web instansi pemerintah berdasarkan data pada angka Nomor 1 yang digunakan untuk menemukan terjemahan nama instansi dan sebagai patokan apakah sebuah instansi sudah memiliki terjemahan nama instansinya. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah nama instansi dan tidak mencakup nama unit kerja yang ada di dalamnya;
3. mendata situs web instansi pemerintah yang sudah memiliki versi bahasa asing dan yang belum memiliki dan mengidentifikasi terjemahan nama instansi di situs web instansi pemerintah tersebut;
4. menganalisis terjemahan nama instansi pemerintah yang sudah ada serta melihat keseragaman, kesamaan, atau perbedaan dengan terjemahan dari instansi lain;
5. mengusulkan terjemahan nama instansi pemerintah yang belum tersedia dan mengidentifikasi masalah terkait penerjemahan instansi dan menawarkan solusi untuk mengatasi masalah tersebut.

3. HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Bagian ini membahas hasil penelitian ini berdasarkan temuan yang ditemukan dari sumber data untuk penelitian serta pembahasannya.

3.1 Hasil Penelitian

Berdasarkan data yang diperoleh, teridentifikasi sejumlah instansi pemerintah yang sudah memiliki terjemahan resmi dan instansi yang belum memiliki terjemahan bahasa Inggris. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, terjemahan resmi yang dimaksud dalam penelitian ini merujuk kepada terjemahan nama instansi yang dimuat dalam situs resmi instansi terkait walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa bisa saja ada instansi yang sudah memiliki terjemahan resmi, tetapi tidak mencantumkanannya dalam situs web resminya.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia, yang salah satu tugas dan fungsinya mengatur urusan administrasi lembaga pemerintah di Indonesia, mengategorikan instansi pemerintah ke dalam sembilan kategori seperti yang disajikan dalam Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Sembilan Kategori Instansi Pemerintah

No	Kategori	Jumlah
1.	Kementerian	34
2.	Lembaga Pemerintah Non-Kementerian	26
3.	Alat Negara	3
4.	Sekretariat Jenderal Lembaga Negara	7
5.	Lembaga Penyiaran Publik	2
6.	Sekretariat/Sekretariat Jenderal Lembaga Non Struktural (JPT Madya)	11
7.	Sekretariat Lembaga Non Struktural (JPT Pratama/JA)	18
8.	Lembaga Pemerintah Lainnya	2
9.	Lembaga Non Struktural	83
TOTAL		190

Khusus untuk kementerian, secara historis penggunaan istilah “kementerian” itu sendiri telah banyak mengalami perubahan. Pada masa Orde Baru, istilah yang digunakan adalah “departemen”, “kantor menteri negara”, dan “kantor menteri koordinator”. Pada tahun 1998,

istilah “kementerian negara” dan “kementerian koordinator” mulai digunakan, sementara istilah “departemen” tetap dipertahankan. Sejak Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 dan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 berlaku, istilah “kementerian” kembali digunakan.

Kementerian sendiri merupakan sebuah lembaga pemerintahan Indonesia yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, berkedudukan di ibu kota negara, dan berada di bawah tanggung jawab Presiden. Tujuan didirikannya kementerian adalah membantu Presiden dalam menjalankan pemerintahan negara. Setiap kementerian mempunyai bidang berbeda yang menangani urusan tertentu dan tugas serta fungsinya yang berbeda-beda tiap bidangnya. Adapun landasan hukum kementerian di Indonesia adalah Bab 5 Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa:

- Presiden dibantu kementerian negara Indonesia;
- Menteri diangkat dan diberhentikan Presiden;
- Tiap kementerian atau menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan; dan
- Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

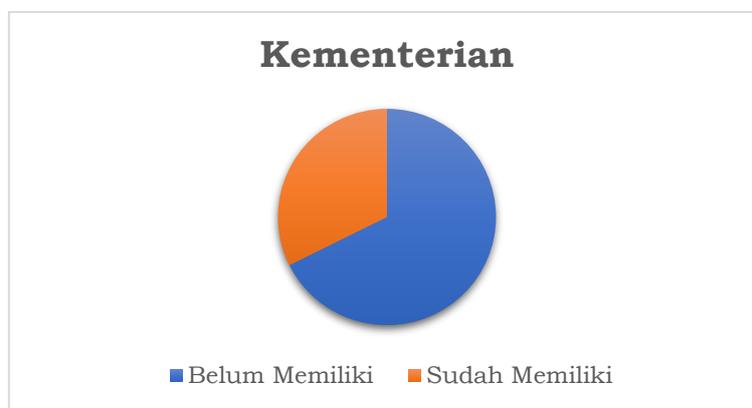
Di Indonesia juga dikenal lembaga nonkementerian yang dibentuk Presiden untuk mendukung dan membantu pemerintah dalam menjalankan tugas tertentu. Lembaga-lembaga tersebut berada langsung di bawah Presiden dan bertanggung jawab melaporkan seluruh kegiatan dan program kerjanya langsung kepada Presiden lewat menteri. Keberadaan lembaga-lembaga tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 yang mengatur mengenai segala hal yang berhubungan dengan lembaga-lembaga tersebut, mulai dari kedudukan, tugas, fungsi, tujuan, wewenang, tata kerja, dan susunan organisasinya.

Dari data yang diperoleh dalam penelitian ini, secara garis besar teridentifikasi dua masalah utama seputar penerjemahan nama instansi di Indonesia, antara lain sebagai berikut.

1. Mayoritas Instansi Pemerintah Belum Memiliki Terjemahan Bahasa Inggris Nama Instansi

Dari 190 instansi pemerintah yang ada, hanya sebagian kecil yang sudah memiliki terjemahan resmi bahasa Inggris nama instansi berdasarkan terjemahan nama instansi yang dicantumkan di situs resmi instansi.

Pada kategori Kementerian, hanya 11 dari 34 kementerian sudah memiliki terjemahan resmi, yang berarti bahwa lebih dari separuh kementerian di Indonesia belum memiliki terjemahan resmi nama instansi.



Hal yang sama juga ditemukan dalam kategori Lembaga Pemerintah Nonkementerian. Dari 26 lembaga pemerintah nonkementerian yang ada, hanya 6 yang sudah memiliki terjemahan resmi nama instansi.



Untuk kategori Alat Negara yang hanya terdiri dari tiga instansi, semuanya belum memiliki terjemahan resmi nama instansi.



Untuk terjemahan dalam kategori Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, hanya 3 dari 7 instansi yang sudah memiliki terjemahan resmi.



Untuk kategori Lembaga Penyiaran Publik yang hanya ada dua instansi di dalamnya, kedua instansi yakni TVRI dan RRI belum memiliki terjemahan resmi.



Dalam kategori Sekretariat Jenderal Lembaga Non-struktural JPT Madya, terjemahannya merujuk kepada terjemahan lembaga nonstruktural dan sebagian besar belum memiliki terjemahan resmi.

Adapun untuk terjemahan kategori Lembaga Pemerintah Lainnya, yakni Sekretariat Kabinet dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, keduanya sudah memiliki terjemahan resmi nama instansi.



Untuk terjemahan nama instansi dari kategori Lembaga Nonstruktural, dari 77 instansi, belum ada lembaga yang memiliki terjemahan resmi yang dimuat di situs web resmi instansi.



Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian ini, dapat dikatakan bahwa secara umum, memang hanya sebagian kecil instansi pemerintah yang sudah memiliki terjemahan resmi. Kondisi ini dimungkinkan karena belum banyak instansi yang merasa perlu untuk memiliki terjemahan resmi nama instansi, bahkan untuk bahasa Inggris yang dianggap sebagai bahasa internasional atau global.

Alasan lain yang dapat menyebabkan terciptanya kondisi ini adalah bahwa lembaga-lembaga tersebut tidak atau belum banyak memiliki keterkaitan erat dengan pihak asing (pemerintah negara lain, lembaga

internasional, dll.) sehingga belum ada dorongan yang kuat untuk menerjemahkan nama instansi serta meresmikannya. Hal ini berbeda dengan instansi-instansi seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, atau Kementerian Investasi, misalnya, yang dapat dikatakan banyak memiliki keterkaitan dengan pihak luar negeri sehingga keperluan akan terjemahan resmi dari instansi-instansi tersebut memang ada. Padahal, semua instansi pemerintah sebetulnya perlu memiliki terjemahan nama instansi dan meresmikannya karena selalu akan ada keperluan untuk memiliki terjemahan nama instansi, baik dari pihak internal instansi itu sendiri maupun dari pihak luar instansi. Apalagi, saat ini peran dan kepemimpinan Indonesia di dunia internasional semakin kuat, dibuktikan dengan sering diselenggarakannya forum-forum internasional di Indonesia serta partisipasi Indonesia yang kian meningkat dalam forum-forum atau kerja sama internasional.

Kekurangan sumber daya manusia dalam bidang penerjemahan di sebagian instansi pemerintah di Indonesia juga dapat menyebabkan instansi-instansi tersebut belum memiliki terjemahan nama instansi, termasuk nomenklatur unit kerja dan jabatan yang ada di dalamnya. Menerjemahkan nama instansi, serta nama-nama jabatan yang ada di dalamnya, bukan perkara mudah dan perlu teknik dan strategi menerjemahkan yang cukup, serta pengalaman menerjemahkan yang banyak. Dalam hal ini, instansi-instansi pemerintah juga perlu didorong untuk merekrut dan memiliki penerjemahnya sendiri. Di Indonesia sendiri, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki tugas khusus di bidang penerjemahan sudah memiliki rumpun jabatannya sendiri yang bernama Jabatan Fungsional Penerjemah (JFP), dengan nama jabatan Pejabat Fungsional Penerjemah (PFP) yang terbagi ke dalam empat jenjang, yaitu Penerjemah Ahli Pertama, Penerjemah Ahli Muda, Penerjemah Ahli Madya, dan Penerjemah Ahli Utama. Terkait dengan penerjemahan nama instansi pemerintah, sudah seharusnya tugas penerjemahan ini menjadi salah satu fokus dari para PFP.

Oleh karena itu, instansi pemerintah yang belum memiliki terjemahan nama instansi perlu didorong untuk menerjemahkan dan meresmikannya, serta mempublikasikan terjemahan nama instansi, misalnya melalui situs web instansi. Data yang ada menunjukkan bahwa hampir semua instansi pemerintah kini sudah memiliki situs web instansi, dengan pengecualian instansi-instansi yang masih baru terbentuk. Keadaan yang sudah baik ini akan menjadi jauh lebih baik jika semua instansi juga memiliki versi bahasa asing dari situs web dan mencantumkan terjemahan resmi nama instansi sehingga masyarakat umum, dalam dan luar negeri, yang ingin mengetahui terjemahan bahasa Inggris dari nama instansi terkait dapat dengan mudah mengaksesnya.

2. Terjemahan Nama Instansi Yang Ada Belum Seragam dan Konsisten

Selain masih sedikitnya instansi pemerintah yang sudah menerjemahkan secara resmi nama instansi, masalah lain yang teridentifikasi adalah belum adanya keseragaman dalam terjemahan nama-nama instansi yang ada. Ketidakterseragaman tersebut utamanya terlihat dari sisi pilihan kata dan gaya terjemahan, misalnya padanan untuk istilah-istilah seperti badan, lembaga, atau dewan yang digunakan dalam nama instansi pemerintah.

Pada Tabel 2 berikut disajikan sejumlah istilah yang digunakan oleh instansi pemerintah nonkementerian yang ada di Indonesia.

Tabel 2. Istilah yang Digunakan dalam Nama Instansi Pemerintah

No	Nama Istilah	Definisi	Contoh Penggunaan
1.	Badan	Badan: (n) sekumpulan orang yang merupakan kesatuan untuk mengerjakan sesuatu	Badan Kepegawaian Negara
2.	Lembaga	Lembaga:	Lembaga Sensor Film

No	Nama Istilah	Definisi	Contoh Penggunaan
		(n) badan (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha	
3.	Komisi	Komisi: (n) sekelompok orang yang diberi kepercayaan dan wewenang oleh pemerintah atau lembaga resmi untuk menjalankan tugas tertentu	Komisi Pemberantasan Korupsi
4.	Dewan	Dewan: (n) majelis atau badan yang terdiri atas beberapa orang anggota yang pekerjaannya memberi nasihat, memutuskan suatu hal, dan sebagainya dengan jalan berunding	Dewan Energi Nasional (DEN)
5.	Majelis	Majelis: (n). dewan yang mengemban tugas tertentu mengenai kenegaraan dan sebagainya secara terbatas	Majelis Permusyawaratan Rakyat
6.	Komite	Komite: (n). sejumlah orang yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas tertentu oleh kelompok yang lebih besar, biasanya orang-orang	Komite Nasional Keselamatan Transportasi

No	Nama Istilah	Definisi	Contoh Penggunaan
		tersebut berasal dari kelompok itu sendiri.	
7.	Otorita	Otoritas: (n). badan resmi yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengelola bidang kegiatan tertentu	Otorita Jasa Keuangan
8.	Pusat	Pusat: (n). pokok pangkal atau yang menjadi pempunan (berbagai-bagai urusan, hal, dan sebagainya):	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
9.	Konsil	Konsil: (n). lembaga yang melaksanakan tugas secara independen dalam rangka meningkatkan mutu praktik dan kompetensi teknis keprofesian.	Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia
10	Kantor	Kantor: (n). balai (gedung, rumah, ruang) tempat mengurus suatu pekerjaan (perusahaan dan sebagainya); tempat bekerja;	Kantor Staf Kepresidenan

Sumber: Kamus Besar Bahasa Indonesia versi daring

Berdasarkan Tabel 2 di atas, dapat dikatakan bahwa sebetulnya makna dari istilah-istilah seperti *komisi* atau *lembaga* itu hampir sama dan cenderung tumpang tindih. Dengan kata lain, tidak ada perbedaan makna antara kata *komisi* atau kata *lembaga* sehingga penulis

berpendapat bahwa pemilihan istilah untuk instansi pemerintah (di luar kementerian) cenderung manasuka. Jika ditelaah, perbedaan antara dua instansi yang sama berdasarkan kategori instansi tetapi berbeda dari penggunaan istilah yang digunakan, akan ditemukan ketidakteraturan.

Apa perbedaan antara “KPK” dan “LKPP”? Berdasarkan kategori yang dibuat oleh Kemenpan RB, kedua instansi tersebut berada dalam kategori yang sama yakni Instansi Pemerintah Nonkementerian tetapi istilah yang digunakan berbeda yakni *komisi* dan *lembaga*. Bahkan ada juga sejumlah instansi yang menggunakan istilah yang tidak banyak digunakan instansi lain seperti *Kantor Staf Presiden* atau *Otorita Jasa Keuangan*.

Permasalahan lain kemudian timbul ketika penerjemah harus mengalihbahasakan nama instansi tersebut ke dalam bahasa asing. Misalnya, ketika harus menerjemahkan kata *badan* ke dalam bahasa Inggris. Berdasarkan pencarian tidak hanya dari situs web resmi instansi terkait tetapi juga dari sejumlah media berbahasa Inggris di Indonesia, ditemukan tiga padanan untuk kata *badan* itu sendiri seperti dijelaskan dalam tabel berikut.

Badan Pengawas Pemilu	Election Monitoring Body
Badan Narkotika Nasional	National Narcotics Agency
Badan Pemeriksa Keuangan	Audit Board of the Republic of Indonesia

Khusus untuk Badan Pusat Statistik, terjemahan resmi yang instansi tersebut miliki adalah Statistics Indonesia. Perbedaan di atas menunjukkan bahwa satu istilah yang digunakan dalam nama instansi pemerintah di Indonesia dapat dimaknai dan dipadankan berbeda. Hal ini dapat dipahami karena memang istilah-istilah yang digunakan dalam bahasa Indonesia pun beragam walaupun memiliki makna yang sama. Pertanyaannya adalah, mana padanan yang akurat untuk *badan*? Apakah *body*, *agency*, atau *board*? Ketidakteraturan dan inkonsistensi terjemahan yang ada juga dapat diakibatkan karena setiap instansi

melakukan penerjemahan tanpa adanya standar nasional atau standar baku yang dapat menjadi rujukan.

Hal lain yang penting juga diperhatikan adalah perlunya juga mulai menggunakan dan mensosialisasikan singkatan terjemahan Bahasa Inggris. Selama ini, yang paling banyak dikenal *MOFA* untuk *Ministry of Foreign Affairs* atau *AGO* untuk *Attorney General Office*. Singkatan dari terjemahan bahasa Inggris instansi lain pun perlu mulai diperkenalkan seperti *MOH* (*Ministry of Health*), *MOD* (*Ministry of Defense*), dan lain sebagainya. Ini penting dilakukan untuk efisiensi dalam menerjemahkan sehingga penerjemah dapat juga menggunakan singkatan nama instansi tersebut apabila disebut berulang-ulang.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Penerjemahan nama-nama instansi pemerintah di Indonesia masih menyisakan masalah, antara lain bahwa masih banyak instansi pemerintah belum menerjemahkan dan meresmikan terjemahan nama instansi. Padahal, terjemahan resmi nama instansi pemerintah di Indonesia membawa dampak yang luas karena terjemahan resmi tersebut akan selalu diperlukan oleh berbagai kalangan. Selain itu, untuk terjemahan nama instansi yang sudah ada, terjemahannya belum seragam dan konsisten. Oleh karena itu, instansi-instansi penerjemah perlu didorong untuk menerjemahkan nama instansi dan meresmikannya. Ketiadaan terjemahan resmi dari nama-nama instansi tersebut dapat menimbulkan kebingungan bagi penerjemah atau masyarakat luas yang memerlukan terjemahan resmi tersebut sehingga mereka terpaksa harus mencari sumber lain atau menerjemahkan sendiri.

Perlu juga ada instansi atau lembaga yang berwenang “menetapkan” terjemahan resmi dari nama instansi pemerintah serta menetapkan panduan dalam hal penerjemahan nama instansi. Hal ini penting dilakukan agar terjemahan yang ada konsisten dan seragam. Yang tidak kalah pentingnya adalah koordinasi antara lembaga-lembaga

terkait seperti Kementerian PANRB dengan Sekretariat Kabinet selaku instansi pembina Jabatan Fungsional Penerjemah, serta instansi-instansi terkait lain, seperti Kementerian Luar Negeri dan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, tidak hanya dalam menerjemahkan dan meresmikan terjemahan nama instansi, tetapi juga menyelaraskan terjemahan nama instansi yang sudah ada.

Penelitian ini juga mengisi kekosongan dari bidang yang belum banyak diteliti, yakni penerjemahan nama instansi pemerintah dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris. Akan tetapi, penelitian ini masih dapat dikembangkan lebih lanjut, misalnya dengan melakukan penelitian dalam pasangan bahasa lain seperti bahasa Indonesia ke dalam bahasa Mandarin atau Arab atau juga lebih jauh meneliti penerjemahan unit-unit kerja yang ada di dalam instansi pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Artikel Jurnal

- Colina, S. (2015). *Fundamentals of Translation*. Cambridge, UK: Cambridge University Press. Kindle Edition.
- Hatim, B., & Munday, J. (2013). Translation An Advanced Resource Book. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Oktaviani, Dewi, et al., (2010). Penataan Mekanisme Hubungan Antar Lembaga Negara, Pusat Kinerja Kelembagaan LAN, Jakarta. *Mimbar Hukum* (Vol. 28, Nomor 1).
- Ren, Feiliang, et al., (2009), Chinese-English Organization Name Translation Based on Correlative Expansion.
- Sayogie, Frans. (2008). Equivalence and Untranslatability in English Translations of UUD Negara Republik Indonesia 1945. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research, Volume 302*.
- Simamora, Janpatar, (2016), Problematika Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi. *Mimbar Hukum* (Vol. 28, Nomor 1).

B. Artikel Berita Daring

- Pemerintah Ubah Departemen Jadi Kementerian. (2010, Januari 8). *Antara*.
- Kenapa departemen diganti kementerian. (2022, Juli 29). *Kompas.com*
- Yusuf, Aris. (2020, Juli, 9). 31 Lembaga Pemerintah Non Kementerian di Indonesia. *Gramedia Blog*.

LAMPIRAN

A. Kementerian

No	Nama Instansi	Terjemahan dari Situs Web Instansi	Usulan Terjemahan	Usulan Singkatan Terjemahan	Alamat Situs Web Instansi	Ket.
1.	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	-	Coordinating Ministry for Political, Legal, and Security Affairs	CMPLSA	https://polkam.go.id/	
2.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	-	Coordinating Ministry for Economic Affairs	CMEA	https://www.ekon.go.id/	
3.	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	-	Coordinating Ministry for Human Development and Culture	CMHDC	https://www.kemendikbud.go.id/	
4.	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	-	Coordinating Ministry of Maritime Affairs and Investment	CMAI	https://maritim.go.id/	
5.	Kementerian Sekretariat Negara	-	Ministry of State Secretariat	MoSS	https://www.setneg.go.id/	
6.	Kementerian Dalam Negeri	-	Ministry of Home Affairs	MoHA	https://www.kemendagri.go.id/	
7.	Kementerian Luar Negeri	Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia	-	MoFA	https://kemlu.go.id/portal/en	
8.	Kementerian Pertahanan	-	Ministry of Defense	MoD	https://www.kemhan.go.id/	

No	Nama Instansi	Terjemahan dari Situs Web Instansi	Usulan Terjemahan	Usulan Singkatan Terjemahan	Alamat Situs Web Instansi	Ket.
9.	Kementerian Agama	-	Ministry of Religious Affairs	MoRA	https://www.kemena.g.go.id/	
10.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Ministry of Law and Human Rights Republic of Indonesia	-	MoLHR	https://kemenkumham.go.id/	
11.	Kementerian Keuangan	Ministry of Finance Republic of Indonesia	-	MoF	https://www.kemenukeu.go.id/home	
12.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-	Ministry of Education and Culture	MOEC	https://www.kemdikbud.go.id/	
13.	Kementerian Kesehatan	-	Ministry of Health	MOH	https://www.kemkes.go.id/	
14.	Kementerian Sosial	Ministry of Social Affairs Republic of Indonesia	-	MoS	https://kemensos.go.id/	
15.	Kementerian Ketenagakerjaan	-	Ministry of Manpower	MoM	https://kemnaker.go.id/	
16.	Kementerian Perindustrian	-	Ministry of Industry	MoI	https://kemenperin.go.id/	
17.	Kementerian Perdagangan	Ministry of Trade	-	MoT	https://www.kemendag.go.id/	

No	Nama Instansi	Terjemahan dari Situs Web Instansi	Usulan Terjemahan	Usulan Singkatan Terjemahan	Alamat Situs Web Instansi	Ket.
18.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Ministry of Energy and Mineral Resources Republic of Indonesia	-	MoE	https://www.esdm.go.id/en	
19.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	Ministry of Public Works and Public Housing	MoPWP	https://www.pu.go.id/	
20.	Kementerian Perhubungan	-	Ministry of Transportation	MoTO	https://dephub.go.id/	
21.	Kementerian Komunikasi dan Informatika	-	Ministry of Communications and Informatics	MOCI	https://www.kominfo.go.id/	
22.	Kementerian Pertanian	Ministry of Agriculture Republic of Indonesia		MoA	https://pertanian.go.id/ide_en.php	
23.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	Ministry of the Environment and Forestry	MoEF	https://www.menlhk.go.id/	
24.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Ministry of Marine Affairs and Fisheries	-	MoMAF	https://kkp.go.id/	

No	Nama Instansi	Terjemahan dari Situs Web Instansi	Usulan Terjemahan	Usulan Singkatan Terjemahan	Alamat Situs Web Instansi	Ket.
		Republic of Indonesia				
25.	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Ministry of Village, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration	-	MoVDDRT	https://kemendesa.go.id/berita/	
26.	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	-	Ministry of Agrarian and Spatial Planning	MoASP	https://www.atrbpn.go.id/	
27.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	-	Ministry of National Development Planning/National Development Planning Agency	MNDP/NDPA	https://www.bappenas.go.id/en	
28.	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	-	Ministry of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reforms	MOSEBR	https://menpan.go.id/site/	
29.	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	-	Ministry of State-Owned Enterprises	MSOE	https://bumn.go.id/?lang=en&lang=ide	

No	Nama Instansi	Terjemahan dari Situs Web Instansi	Usulan Terjemahan	Usulan Singkatan Terjemahan	Alamat Situs Web Instansi	Ket.
30.	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah		Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises	MoCSME	https://kemenkopukm.go.id/	
31.	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Ministry of Tourism and Creative Economy/ Tourism and Creative Economy Agency	-	MoTC	https://kemenparekr af.go.id/en	
32.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	Ministry of Women Empowerment and Child Protection	MWECP	https://www.kemendpppa.go.id/#	
33.	Kementerian Pemuda dan Olahraga	-	Ministry of Youth and Sport	MoYS	https://www.kemendpora.go.id/	
34.	Kementerian Investasi	Ministry of Investment/ BKPM	-	MoIN	https://www.bkpm.go.id/en/home	

B. Lembaga Pemerintah Non Kementerian

No	Nama Instansi	Terjemahan dari Situs Web Instansi	Usulan Terjemahan	Usulan Singkatan Terjemahan	Alamat Situs Web Instansi	Ket.
1.	Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)	The National Achieve of the Republic of Indonesia	-	NARI	https://anri.go.id/en/profile/history	
2.	Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Tourism and Creative Economy Agency	-	TCEA	https://kemenparekraf.go.id/en	
3.	Badan Informasi Geospasial (BIG)	-	Geospatial Information Agency	GIA	https://www.big.go.id/en	
4.	Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (BAKAMLA)	-	Maritime Security Agency	MSA	https://bakamla.go.id/	
5.	Badan Kepegawaian Negara (BKN)	-	National Civil Service Agency	NCSA	https://www.bkn.go.id/	
6.	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)	-	National Population and Family Planning Agency	NPFPA	https://www.bkkbn.go.id/	
7.	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)	Meteorological, Climatological, and Geophysical Agency	Meteorology, Climatology and Geophysics Agency	MCGA	https://www.bmkg.go.id/en.html	
8.	Badan Narkotika Nasional (BNN)	-	National Narcotics Agency	NNA	https://bnn.go.id/	

No	Nama Instansi	Terjemahan dari Situs Web Instansi	Usulan Terjemahan	Usulan Singkatan Terjemahan	Alamat Situs Web Instansi	Ket.
9.	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)	-	National Disaster Mitigation Agency	NDMA	https://bnpb.go.id/	
10.	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)	-	National Counterterrorism Agency	NCA	https://www.bnpt.go.id/	
11.	Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)	-	Indonesian Migrant Worker Protection Agency	IMWPA	https://bp2mi.go.id/	
12.	Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	-	Finance and Development Supervisory Agency	FDSA	https://www.bpkp.go.id/	
13.	Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)	-	Nuclear Energy Regulatory Agency	NERA	https://www.bapeten.go.id/?lang=en	
14.	Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM)	-	Food and Drug Monitoring Agency	FDMA	https://www.pom.go.id/new/	
15.	Badan Pusat Statistik (BPS)	Statistics Indonesia		SI	https://www.bps.go.id/	
16.	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS)	-	National Search and Rescue Agency	NSRA	https://basarnas.go.id/	
17.	Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)	-	National Cyber and Encryption Agency	NCEA	https://bssn.go.id/	
18.	Badan Standardisasi Nasional (BSN)	-	National Standardization Agency	NSA	https://www.bsn.go.id/	

No	Nama Instansi	Terjemahan dari Situs Web Instansi	Usulan Terjemahan	Usulan Singkatan Terjemahan	Alamat Situs Web Instansi	Ket.
19.	Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan)	National Nuclear Agency of Indonesia	-	NNAI	https://www.batan.go.id/index.php/en/	
20.	Lembaga Administrasi Negara (LAN)	-	State Administration Agency	SAA	https://lan.go.id/	
21.	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)	Indonesian Institute of Sciences	-	IIS	http://lipi.go.id/	
22.	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)	-	National Public Procurement Agency	NPPA	http://www.lkpp.go.id/v3/en/	
23.	Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas)	-	National Resilience Institute	NRI	https://www.lemhannas.go.id/	
24.	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)	-	National Institute of Aeronautics and Space of Indonesia (NIASI)	NIASI	https://www.lapan.go.id/	
25.	Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS)	-	National Library of the Republic of Indonesia	NLRI	https://www.perpusnas.go.id/	
26.	Badan Riset dan Inovasi Nasional	-	National Research and Innovation Agency	NRIA	https://www.brin.go.id/	

C. Alat Negara

No	Nama	Terjemahan Dari Situs Web Instansi	Usulan Terjemahan	Usulan Singkatan Terjemahan	Alamat Situs Web Instansi	Ket.
1.	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	-	Indonesian National Defense Forces	INDF	https://tni.mil.id/#	
2.	Kepolisian Republik Indonesia	-	National Police of the Republic of Indonesia	NPRI	https://polri.go.id/	
3.	Kejaksaan Agung RI	-	Attorney General Office	AGO	https://www.kejaksaan.go.id/index.php	

D. Lembaga Penyiaran Publik

No	Nama	Terjemahan Dari Situs Web Instansi	Usulan Terjemahan	Usulan Singkatan Terjemahan	Alamat Situs Web Instansi	Ket.
1.	Televisi Republik Indonesia	-	Television of the Republic of Indonesia	TVRI	https://tvri.go.id/	
2.	Radio Republik Indonesia	-	Radio of the Republic of Indonesia	RRI	https://www.rri.co.id/	

E. Sekretariat Jenderal Lembaga Negara

No	Nama Instansi	Terjemahan Dari Situs Web Instansi	Usulan Terjemahan	Usulan Singkatan Terjemahan	Alamat Situs Web Instansi	Ket.
1.	Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	-	Secretariat General of National Commission on Human Rights	-	https://www.komnasham.go.id/	

No	Nama Instansi	Terjemahan Dari Situs Web Instansi	Usulan Terjemahan	Usulan Singkatan Terjemahan	Alamat Situs Web Instansi	Ket.
2.	Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilu	-	Secretarat General of Election Supervisory Agency	-	https://www.bawaslu.go.id/id/profil/deputi-bawasluri	
3.	Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum	-	Secretariat General of General Election Commission	-	https://www.kpu.go.id/page/read/1098/struktur-organisasi-kpu-ri	
4.	Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	-	Secretariat General of Witness and Victim Protection Agency	-	https://lpsk.go.id/home	
5.	Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia	-	Secretariat General of Ombudsman of the Republic of Indonesia	-	https://ombudsman.go.id/news/index?tag=sekretariat+jenderal	
6.	Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	-	Secretariat General of National Resilience Council	-	https://www.lehannas.go.id/index.php	
7.	Sekretariat Jenderal Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)	-	Secretariat General of National Border Management Agency	-	-	Belum memiliki situs web
8.	Sekretariat Utama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)	-	Secretariat General of Financial Transaction Reports and Analysis Center	-	https://www.ppattk.go.id/	

No	Nama Instansi	Terjemahan Dari Situs Web Instansi	Usulan Terjemahan	Usulan Singkatan Terjemahan	Alamat Situs Web Instansi	Ket.
9.	Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional	-	Secretariat General of National Energy Board	-	https://www.denn.go.id/index.php/	
10.	Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden	-	Secretariat General of Presidential Advisory Council	-	https://wantimpres.go.id/id/benda/	
11.	Sekretariat Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi	-	Secretariat General of Corruption of Eradication Commission	-	https://www.kpk.go.id/id/splash	

F. Lembaga Pemerintah Lainnya

No	Nama	Terjemahan Dari Situs Web Instansi	Usulan Terjemahan	Usulan Singkatan Terjemahan	Situs Web Instansi	Ket.
1.	Sekretariat Kabinet	Cabinet Secretariat of the Republic of Indonesia	-	CSRI	https://setkab.go.id/en	
2.	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)	Pancasila Ideology Education Agency	-	PIEA	https://snippet.bpip.go.id/	

G. Lembaga Non Struktural

No	Nama	Terjemahan Dari Situs Web Instansi	Usulan Terjemahan	Usulan Singkatan Terjemahan	Situs Web Instansi	Ket.
1.	Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia	-	Indonesian Academy of Sciences	IAS	https://aiipi.or.id/	

No	Nama	Terjemahan Dari Situs Web Instansi	Usulan Terjemahan	Usulan Singkatan Terjemahan	Situs Web Instansi	Ket.
2.	Badan Amil Zakat Nasional	-	National Alms Agency	NAA	https://baznas.go.id/	
3.	Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (Batosupal)	-	Counterfeit Rupiah Eradication Coordinating Agency	CRECA	https://www.setneg.go.id/view/index/badan_koordinasi_pemberantasan_rupiah_palsu_1	
4.	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	-	National Border Management Agency	NBMA	https://bnpp.go.id/	
5.	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	-	National Professional Certification Agency	NPCS	https://bnsp.go.id/	
6.	Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi	-	Downstream Oil and Gas Regulatory Agency	DOGRA	https://www.bphmgas.go.id/	
7.	Badan Pengawas Pemilihan Umum	-	Election Supervisory Agency	ESA	https://www.bawaslu.go.id/	
8.	Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia	-	Indonesian Hospital Supervisory Agency	IHSA	https://bprs.kemkes.go.id/v1/index.php	
9.	Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba	-	Lake Toba Tourism Area Management Agency	Lake Toba TAMA	-	Belum memiliki situs web
10.	Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur	-	Borobudur Tourism Area Management Agency	Borobudur TAMA	https://bob.kemendparekraf.go.id/	

No	Nama	Terjemahan Dari Situs Web Instansi	Usulan Terjemahan	Usulan Singkatan Terjemahan	Situs Web Instansi	Ket.
11.	Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores	-	Labuan Bajo Flores Tourism Area Management Agency	Labuan Bajo Flores TAMA	https://labuanbajoflores.id/	
12.	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	-	Batam Free Trade Area and Free Port Concession Agency	Batam FTAFPCA	https://bpbata.go.id/	
13.	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan	-	Bintan Free Trade Area and Free Port Concession Agency	Bintan FTAFPCA	https://bpbintan.go.id/	
14.	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun	-	Karimun Free Trade Area and Free Port Concession Agency	Karimun FTAFPCA	https://www.bpkarimun.id/	
15.	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	-	Sabang Free Trade Zone and Free Port Concession Agency	Sabang FTAFPCA	https://bpks.go.id/	
16.	Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN-RI)	-	National Consumer Protection Agency	NCPA	https://bpkn.go.id/	
17.	Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK)	-	State Personnel Advisory Board	SPAB	-	Belum memiliki situs web

No	Nama	Terjemahan Dari Situs Web Instansi	Usulan Terjemahan	Usulan Singkatan Terjemahan	Situs Web Instansi	Ket.
18.	Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional	-	National Health Advisory Agency	NHAA	-	Belum memiliki situs web
19.	Badan Restorasi Gambut dan Mangrove	-	Peat and Mangrove Restoration Agency	PMRA	https://brgm.go.id/	
20.	Dewan Energi Nasional	-	National Energy Board	NEB	https://den.go.id/	
21.	Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan	-	Titles, Medals, and Honors Council	TMHC	-	Belum memiliki situs web
22.	Dewan Jaminan Sosial Nasional	-	National Social Security Council	NSSC	-	Belum memiliki situs web
23.	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	-	Batam Free Trade Zone and Free Port Council	Batam FTZFPC	-	Belum memiliki situs web
24.	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan	-	Bintan Free Trade Zone and Free Port Council	Bintan FTZFPC	-	Belum memiliki situs web
25.	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun	-	Karimun Free Trade Zone and Free Port Council	Karimun FTZFPC	-	Belum memiliki situs web
26.	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	-	Sabang Free Trade Zone and Free Port Council	Sabang FTZFPC	-	Belum memiliki situs web

No	Nama	Terjemahan Dari Situs Web Instansi	Usulan Terjemahan	Usulan Singkatan Terjemahan	Situs Web Instansi	Ket.
27.	Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu	-	Election Organizer Ethics Council	EOEC	https://dkpp.go.id/	
28.	Dewan Ketahanan Nasional	-	National Resilience Council	NRC	https://www.wantannas.go.id/	
29.	Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus	-	Special Economic Zones National Council	SEZNC	https://kek.go.id/dewan-nasional-kek	
30.	Dewan Nasional Keuangan Inklusif	-	Inclusive Finance National Council	IANC	https://snki.go.id/	
31.	Dewan Pengupahan Nasional	-	National Wages Council	NWC	-	Belum memiliki situs web
32.	Dewan Pers	-	Press Council	PC	https://dewanpers.or.id/	
33.	Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD)	-	Regional Autonomy Advisory Council	RAAC	https://www.wapresri.go.id/dewan-pertimbangan-otonomi-daerah/	
34.	Dewan Pertimbangan Presiden	-	Presidential Advisory Council	PAC	https://wantimpres.go.id/id/benda/	
35.	Dewan Sumber Daya Air Nasional	-	National Water Resources Council	NWRC	https://www.dsdan.go.id/	

No	Nama	Terjemahan Dari Situs Web Instansi	Usulan Terjemahan	Usulan Singkatan Terjemahan	Situs Web Instansi	Ket.
36.	Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (Wantiknas)	-	National Information and Communication Technology Council	NICTC	http://www.wantiknas.go.id/	
37.	Kantor Staf Presiden	-	Office of Presidential Staff	OPS	https://www.kstp.go.id/	
38.	Komisi Banding Merek	-	Brand Appeal Commission	BAC	-	Belum memiliki situs web
39.	Komisi Banding Paten	-	Patent Appeal Commission	PAC	-	Belum memiliki situs web
40.	Komisi Informasi Pusat	-	Central Information Commission	CIC	https://komisiinformasi.go.id/	
41.	Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik	-	Commission on Biosafety of Genetically Engineered Products	CBGEP	-	Belum memiliki situs web
42.	Komisi Kejaksaan	-	Commission of District Attorney Office Republic of Indonesia	CDAO	https://komisi-kejaksaan.go.id/	
43.	Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)	-	National Police Commission	NPC	https://kompolnas.go.id/	

No	Nama	Terjemahan Dari Situs Web Instansi	Usulan Terjemahan	Usulan Singkatan Terjemahan	Situs Web Instansi	Ket.
44.	Komisi Nasional Disabilitas	-	National Commission on Disabilities	NCOD	-	Belum memiliki situs web
45.	Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan	-	National Commission on Violence Against Women	NCVAW	https://komnasperempuan.go.id/	
46.	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	-	National Commission on Human Rights	NCHR	https://www.komnasham.go.id/	
47.	Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	-	Corruption Crime Eradication Commission	CCEC		Belum memiliki situs web
48.	Komisi Pemilihan Umum	-	General Election Commission	GEC	https://www.kpu.go.id/	
49.	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	-	Business Competition Supervisory Commission	BCSC	https://kppu.go.id/	
50.	Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup	-	Assessment of Environmental Impact Analysis Commission	AEIAC		Belum memiliki situs web
51.	Komisi Penyiaran Indonesia	-	Indonesian Broadcasting Commission	IBC	https://kpi.go.id/id/	
52.	Komisi Penyuluhan Nasional	-	National Counselling Committee	NCC		Belum memiliki situs web

No	Nama	Terjemahan Dari Situs Web Instansi	Usulan Terjemahan	Usulan Singkatan Terjemahan	Situs Web Instansi	Ket.
53.	Komisi Perlindungan Anak Indonesia	-	Indonesian Child Protection Commission	ICPC	https://www.kpai.go.id/	
54.	Komite Akreditasi Nasional	-	National Accreditation Committee	NAC	https://kan.or.id/	
55.	Komite Antidumping Indonesia	-	Indonesian Antidumping Committee	IAC		Belum memiliki situs web
56.	Komite Kebijakan Industri Pertahanan	-	Defense Industry Policy Committee	DIPC	https://www.kkip.go.id/	
57.	Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas	-	Acceleration of Priority Infrastructure Provision Committee	APIPC	https://kppip.go.id/	
58.	Komite Nasional Keselamatan Transportasi	-	National Transportation Safety Committee	NTSC	https://knkt.go.id/	
59.	Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah	-	National Committee of Sharia Economy and Finance	NCSEF	https://kneks.go.id/beranda	
60.	Komite Nasional Keamanan Penerbangan	-	National Aviation Safety Committee	NASC		
61.	Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia	-	Indonesian Trade Security Committee	ITSC	http://kppi.kemendag.go.id/	
62.	Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan	-	Corporate Company Privatization Committee	CCPC		Belum memiliki situs web

No	Nama	Terjemahan Dari Situs Web Instansi	Usulan Terjemahan	Usulan Singkatan Terjemahan	Situs Web Instansi	Ket.
63.	Komite Profesi Akuntan Publik	-	Public Accountant Profession Committee	PAPC	https://kpap.go.id/	
64.	Konsil Kedokteran Indonesia	-	Indonesian Medical Council	IMC	https://kki.go.id/	
65.	Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia	-	Indonesian Health Workers Council	IHWC	https://ktki.kemkes.go.id/info/	
66.	Konsil Keperawatan	-	Nursing Council	NC		Belum memiliki situs web
67.	Lembaga Kerja Sama Tripartit (LKS Tripartit)	-	Tripartite Cooperation Institution	TCI		Belum memiliki situs web
68.	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	-	Witness and Victim Protection Agency	WVPC	https://lpsk.go.id/home	
69.	Lembaga Produktivitas Nasional	-	National Productivity Institute	NPI		Belum memiliki situs web
70.	Lembaga Sensor Film	-	Film Censorship Institute	FCI	https://lsf.go.id/	
71.	Lembaga Sertifikasi Industri Hijau	-	Green Industry Certification Institute	GICI		Belum memiliki situs web
72.	Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan	-	Health Workforce Discipline Assembly	HWDA		Belum memiliki situs web

No	Nama	Terjemahan Dari Situs Web Instansi	Usulan Terjemahan	Usulan Singkatan Terjemahan	Situs Web Instansi	Ket.
73.	Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir	-	National Police Commission	NPC		Belum memiliki situs web
74.	Ombudsman Republik Indonesia	-	The Indonesian Ombudsman	IO	https://ombudsman.go.id/	
75.	Otoritas Nasional Senjata Kimia	-	National Authority of Chemical Weapons	NACW		Belum memiliki situs web
76.	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	-	Financial Transaction Reports and Analysis Center	FTRAC	https://www.pp.atk.go.id/	